



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 April 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA  
**UNIT KERJA** : KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA  
**SUB UNIT KERJA** : BIDANG PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SEPTIANA DWIPUTRIANTI
2. Jabatan : ASISTEN KASN
3. NHK : 472037

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 462 m2/150 m2 di SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 160 m2 di SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 119 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
4. Tanah Seluas 116 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/75 m2 di KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 77.000.000

1. MOBIL, HONDA FREED GB3 1,5 S AT (CKD) Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 2 BU AT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----**D. SURAT BERTAHAP** Rp. 860.887.536**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 68.071.066**F. HARTA LAINNYA** Rp. 33.227.643**Sub Total** Rp. 5.539.186.245**III. HUTANG** Rp. ----



## IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

5.539.186.245

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LINGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **15 Mei 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.